

# Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Timor Timur sebelum Kemerdekaannya dari Indonesia

Jerry Indrawan  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Paramadina  
E-mail: jerry\_indrawan18@yahoo.co.id

**Abstract:** Before their independence, East Timor (now Timor Leste) has always trapped in a conflict situation. Such conflicts make East Timor difficult to free themselves from poverty and political unrest (disorder), until finally the uprising brought freedom to this former Indonesian 27th province. There are four actors that are involved in East Timor conflicts before their independence from Indonesia. They are: East Timor themselves, Indonesia, Portugal, and Australia. Santa Cruz and Liquica incident provoked East Timor people to fight more for their freedom, until finally it came on 1999. Beside the incidents, there are four factors causing East Timor people to struggle for independence. Those factors are: poverty, ethnic diversity, repressive political system, and degradation of natural resources. This paper will analyse these four factors as a causing factors of East Timor Independence. Conducted research methodology was qualitative, through library research. The primary data will be acquired from books and websites.

**Keywords:** Conflict, Poverty, Ethnic, Political System, Natural Resources.

**Abstrak:** Sebelum kemerdekaannya, Timor Timur (sekarang Timor Leste) selalu terjebak dalam situasi konflik. Konflik-konflik seperti ini membuat Timor Timut sulit untuk melepaskan dirinya dari kemiskinan dan keresahan (kekacauan) politik, sampai akhirnya pergolakan internal tersebut membawa kemerdekaan kepada negeri bekas provinsi ke-27 Indonesia itu. Ada empat aktor yang terlibat dalam konflik di Timor Timur sebelum kemerdekaannya dari Indonesia. Mereka adalah: Timor Timur sendiri, Indonesia, Portugal, dan Australia. Insiden di Santa Cruz dan Liquica semakin memprovokasi rakyat Timor Timur untuk berjuang demi kemerdekaannya, sampai kemerdekaan itu akhirnya datang di tahun 1999. Selain dua insiden tadi, terdapat empat faktor yang mendasari mengapa rakyat Timor Timur berjuang demi kemerdekaannya. Faktor-faktor tersebut adalah: kemiskinan, keragaman etnis, sistem politik yang represif, dan degradasi sumber daya. Tulisan ini akan menganalisa empat faktor tersebut sebagai penyebab kemerdekaan Timor Timur. Metodologi penelitian dilakukan secara kualitatif melalui riset pustaka. Sumber data primer didapatkan dari buku dan situs internet.

**Kata Kunci:** Konflik, Kemiskinan, Etnis, Sistem Politik, Sumber Daya Alam.

## Pendahuluan

Sejak 1945, sipil atau konflik internal lebih banyak terjadi di dunia daripada konflik antar negara atau internasional. Akan tetapi, pentingnya mempelajari konflik internal ini, dari perspektif global, baru mulai dilakukan pasca berakhirnya perang dingin. Sejak 1990, mulai banyak perkembangan di bidang riset-

riset terkait konflik bersenjata internal atau sipil, yang berfokus pada faktor etnis, lingkungan, politik, dan ekonomi.<sup>173</sup>

Timor Timur, disingkat Timtim (sekarang Timor Leste), merupakan bekas

---

<sup>173</sup> Dan Smith, Trends and Causes of Armed Conflict (Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, 2004), hal. 5.

wilayah jajahan Portugal, yang mana pada tahun 1974 Portugal mengakhiri pendudukannya di sana.<sup>174</sup> Dua tahun setelahnya, Indonesia menginvasi Timtim dan dijadikan provinsi ke-27 negara tersebut. Populasi Timtim berjumlah sekitar 1.040.900 jiwa dengan utamanya beragama Katolik. Timtim mendapat pengakuan internasional atas kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002, dua tahun setelah referendum dilakukan tahun 1999, dan setelah ±24 tahun menjadi bagian dari Indonesia.

Aktor-aktor yang secara jelas berkonflik dalam kasus ini adalah antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Timtim yang menginginkan kemerdekaannya. Dua aktor tersebut dikelompokkan sebagai aktor utama yang secara jelas dapat dilihat sedang berkonflik. Sedangkan aktor sekundernya (tidak langsung) adalah Australia yang awalnya berperan sebagai mediator, tetapi ternyata dalam perjalanannya, malah menjadi motor

dan ikut-ikutan secara tidak langsung membantu pihak Timtim untuk mendapat kemerdekaannya (*securitizing actor*).<sup>175</sup>

*Securitizing actor* adalah pihak yang berada di luar pihak yang berkonflik (*third party*), akan tetapi menggunakan pengaruhnya untuk memprovokasi salah satu pihak yang berkonflik, dan membuat konflik yang terjadi mengalami eskalasi. Dalam konflik ini, objek konfliknya adalah pemerintah Indonesia, di mana mereka menjadikan penduduk Timtim sebagai subjek konflik. Penduduk dibantai, rumah-rumah dan tempat produksi warga dihancurkan, pemerkosaan, pemenjaraan tanpa bukti, dan pastinya pelanggaran hak asasi manusia berat. Sedangkan, Australia bukanlah aktor langsung yang terlibat, tetapi memiliki peran krusial terkait pemisahan Timtim nantinya.

Beberapa alasan umum munculnya konflik di Timtim adalah dampak dari menjamurnya jargon tentang demokrasi yang membuat masyarakat Timtim sadar akan diskriminasi dari Indonesia, dan berusaha untuk lepas darinya. Selain itu, yang menjadi

---

<sup>174</sup> Baca lebih jauh tentang Portugal di Timtim, lihat Peter Carey dan G. Carter Bentley (ed.), *East Timor at the Crossroads: The Forging of a Nation* (New York: Social Science Research Council, 1995), hal. 1-4; dan Andrea Katalin Molnar. 2010. *Timor Leste: Politics, History, and Culture*. New York: Routledge. Hal. 25-45.

---

<sup>175</sup> Ichsan Malik, *Analisis & Perspektif Resolusi Konflik*, [http://www.titiandamai.or.id/konten.php?nama=Sumber&op=detail\\_sumber&id=10](http://www.titiandamai.or.id/konten.php?nama=Sumber&op=detail_sumber&id=10).

potensi konflik adalah dampak dari jwanisasi di daerah-daerah di luar Jawa. Jwanisasi inilah yang membuat penduduk asli Timtim serasa tersingkir dari daerahnya, terutama saat militer menguasai hampir seluruh aspek di Timtim.

Perlakuan tidak adil dari pemerintah berkaitan dengan pembagian pengelolaan SDA yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak tepat, pelanggaran HAM, dan berbagai permasalahan lain yang dinilai diskriminatif adalah akar konflik mengapa akhirnya Timtim ingin merdeka. Dan parahnya, banyak orang Timtim menganggap pendudukan Indonesia sejak tahun 1976 adalah tidak sah. Hal ini yang membuat Xanana Gusmao, dkk untuk memberontak. Berdasarkan tindakan diskriminatif pemerintah Indonesia itulah, permasalahan penelitian dalam tulisan ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya konflik antara penduduk Timtim dengan pemerintah Indonesia. Tulisan ini akan menganalisa faktor-faktor tersebut melalui teori kurva-U dan teori *value and needs*.

### Dinamika Konflik di Timor Leste

Setelah invasi Indonesia tahun 1976,

Timtim dijadikan provinsi ke-27 dari Republik Indonesia. Selama pendudukannya, Indonesia berusaha memenangkan hati masyarakat Timtim, melalui pembangunan infrastruktur, sistem pendidikan yang baik, penggunaan bahasa Indonesia di sekolah, dll sehingga pembangunan di Timtim tumbuh lebih baik daripada pulau-pulau lain di timur Indonesia. Akan tetapi, pembangunan ekonomi Timtim harus melayani kepentingan Jakarta tentunya. Korupsi besar-besaran terjadi di Timtim membuat kesenjangan ekonomi dan persaingan tak sehat menjadi sebuah keniscayaan.

Sementara itu, tentara Indonesia pada awal-awal masa pendudukan, diindikasikan melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia karena mengakibatkan tewasnya ±200.000 warga Timtim.<sup>176</sup> Pelanggaran-pelanggaran ini termasuk pembantaian penduduk secara acak, pembunuhan diluar hukum, penghancuran sumber-sumber makanan rakyat, meninggal karena penyakit, siksaan, pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal, pemerkosaan, dan

---

<sup>176</sup> Robinson, *op.cit.*, hal. 40-65; Kierman, *op.cit.*, hal. 118-136.

pemerjaraan tanpa tuntutan hukum.<sup>177</sup>

Menurut CAVR (*Commision for Reception, Truth, and Reconciliation*), sesuai dengan mandat penyelidikannya sejak bulan April 1974 sampai Oktober 1999, menemukan bahwa perempuan Timtim secara sistematis diperkosa oleh orang Indonesia, terutama tentara, sebagai bagian dari pemusnahan etnis.<sup>178</sup> Dilaporkan di Kecamatan Atsabe, Kabupaten Ermera, sekitar tahun 2002 sampai 2005 terdapat banyak kejadian brutal, seperti pemerkosaan dan pembunuhan sadis yang dilakukan tanpa alasan, terkadang hanya karena olahraga. Parahnya, bahkan orang-orang yang pro-Indonesia pun tak luput dari kekejaman ini.<sup>179</sup> Tahun 1980, program transmigrasi dijalankan pemerintah Indonesia untuk memindahkan

sejumlah besar keluarga Indonesia ke Timtim.

Hal ini digunakan sebagai strategi menetralsir gerakan kemerdekaan Timtim, selain juga untuk memusnahkan budaya, agama, dan bahasa lokal Timtim.

Perjuangan pejuang-pejuang FALINTIL dari gunung-gunung untuk melawan pasukan Indonesia dilakukan sembunyi-sembunyi. Akan tetapi, perjuangan melalui perang gerilya ujungnya akan sia-sia karena militer Indonesia melakukan taktik pembasmian dan mengepungan pasukan FALINTIL dari bantuan masyarakat lokal, melalui pembunuhan massal ribuan orang yang diduga membantu FALINTIL. Strategi ini membuat bantuan kepada para pejuang terputus, dan banyak pemimpin pejuang kemerdekaan yang terbunuh atau ditangkap tentara Indonesia. Untuk itu, pola perjuangan dan pergerakannya harus berubah.<sup>180</sup>

Tahun 1981, era baru perjuangan dimulai dari membentuk gerakan aktivisme di daerah-daerah perkotaan. Sempat pada tahun 1983 terjadi perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani oleh pemimpin FALINTIL, Xanana Gusmao, dengan Kolonel Purwanto

---

<sup>177</sup> Lihat Stephen McCloskey. 2000. Introduction: East Timor from European to Third World Colonialism. Dalam Paul Hainsworth dan Stephen McCloskey (ed). *The East Timor Question; The Struggle for Independence from Indonesia*. New York: I.B. Taurus. Hal. 4. Walaupun begitu, semua tuduhan terkait militer Indonesia ini masih bersifat sangkaan, karena belum ada bukti-bukti hukum kuat yang mendukung argumen McCloskey tersebut.

<sup>178</sup> Ringkasan penyelidikan CAVR bisa dilihat di: Galuh Wandita, dkk. 2008. *Belajar Mengupayakan Reparasi di Timor-Leste: Menjangkau Para Korban Perempuan*. Dalam Ruth Rubio-Marin (ed). *Perempuan Menggugat: Masalah Gender dan Reparasi dalam Kejahatan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Elsam. Hal. 362-365.

<sup>179</sup> Molnar, *op. cit.*, hal. 49.

<sup>180</sup> Cristalis, *op. cit.*, hal. 160-172.

dari tentara Indonesia. Akan tetapi, Jenderal LB. Moerdani dengan tujuan memberikan pernyataan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pejuang kemerdekaan, membatalkan perjanjian gencatan senjata dan meluncurkan operasi militer baru di Timtim.

Kemudian, pergerakan kemerdekaan Timtim yang berpusat di kota lahir pada tahun 1980-an, bahkan ada yang berdemonstrasi di Jakarta. Pola yang digunakan kali ini adalah aktivisme-aktivisme kampanye untuk menyadarkan publik apa yang terjadi di Timtim melalui organisasi kepemudaan.<sup>181</sup> Pola gerakan macam ini adalah upaya perlawanan untuk menyampaikan opini besar, umumnya tentang pendudukan Indonesia di Timtim kepada masyarakat sipil, baik nasional maupun internasional. Walaupun, terdapat juga faksi-faksi dan ketidaksatuan diantara organisasi-organisasi tersebut, pada sekitar tahun 1990-an.<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> Lengkapnya mengenai organisasi-organisasi ini, lihat George J. Aditjondro. 2001. *Timor Lorosa'e's Transformation from Jakarta's Colony to a Global Capitalist Outpost*. Jakarta: Center for Democracy and Sosial Justice Studies. Hal. 13-17. Selain itu, untuk mencari tahu lebih lanjut terkait mobilisasi opini publik bisa baca Sumaryo Suryokusumo. 2004. *Praktik Diplomasi*. Jakarta: BPIblam. Hal. 167-169.

<sup>182</sup> Cristalis. *op.cit.*, hal. 17.

Ketika para pejuang kemerdekaan melanjutkan perjuangannya di dalam negeri, di luar negeri tiga kelompok utama, LSM Internasional (*East Timor Action Network/ETAN*), Gereja Katolik, dan anggota FRETILIN yang hidup dalam pengasingan masih terus membawa isu kemerdekaan Timtim. Usulan kemerdekaan Timtim mendapat simpati dunia internasional, umumnya karena pendudukan ilegal Indonesia tahun 1976 dan pelanggaran hak asasi manusia, yang mengarah pada genosida.

Pada tahun 1991, mata dunia menoleh ke Timtim ketika pembunuhan massal di Dili, yang dikenal sebagai insiden Santa Cruz, terjadi dengan tertuduh utamanya pihak militer Indonesia. Ceritanya sebagai berikut. Pada 12 November 1991, sekitar 271 warga sipil Timtim dibantai, dan sekitar 200 lainnya hilang di Pemakaman Santa Cruz di Dili.<sup>183</sup> Warga sipil tersebut sedang mengikuti prosesi pemakaman Sebastio Gomez, anak muda yang dibunuh saat terjadi pembantaian ketika PBB mengumumkan akan mengirim delegasi ke Timtim. Kejadiannya, Sebastio ditangkap ketika mencari perlindungan di gereja, lalu

---

<sup>183</sup> *Ibid.*, hal. 48.

dieksekusi dalam jarak dekat dengan pistol ke arah perut korban. Karena marah, gerejanya diserang sekitar 5000 warga sipil Timtim *long march* menghadiri pemakaman Sebastio dengan membawa spanduk berisi tuntutan merdeka.<sup>184</sup> Kegiatan mereka ini dianggap sebagai protes terhadap kekejaman militer Indonesia dan ancaman terhadap stabilitas wilayah, karena itu tentara mengambil tindakan represif terhadap demonstrasi tersebut.

Pasca Santa Cruz, peristiwa besar yang cukup mengguncang adalah insiden berdarah di kota Liquica. Peristiwa itu awalnya disulut perusakan rumah dan penganiayaan Felisberto dos Santos pada bulan April 1999. Milisi Satuan Gabungan Intelijen plus Garda Muda Penegak Integrasi, Gardapaksi yang memulai masalah. Felisberto mengalah, dan minta berdamai, lalu musyawarah direncanakan esok paginya di kantor Desa Dato. Tetapi, sekitar pukul 07.00, saat warga menuju lokasi, kelompok milisi Besi Merah Putih (BMP) melancarkan serangan. Mayat pun bergelimpangan, lengan Pastor setempat,

Rafael dos Santos, luka kena sabet. Seribu orang mengungsi ke gereja, lainnya melarikan diri ke hutan. Akibatnya, Liquica lumpuh dan sepanjang jalan Atambua (NTT) menuju Dili diblokir BMP dan tentara. Uskup Diosis Dili Carlos Felipe Ximenes Belo bahkan menyebutnya sebagai pembantaian massal. Sekitar 25 warga Timtim tewas dan banyak lagi terluka.<sup>185</sup>

Pasca dua insiden pelanggaran HAM tadi, tahun 1997, UDT dan FRETILIN bergabung untuk membentuk *Council for Timorese National Resistance* (CNRT), sebuah unit politik yang melanjutkan perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan penuh dengan Xanana Gusmao sebagai presidennya.<sup>186</sup> Gayung bersambut, Mei 1998, terjadi perubahan politik yang drastis di Indonesia dengan runtuhnya rezim Soeharto. Pergantian rezim membuka pintu terjadinya negosiasi internasional antara Portugal, PBB, dan Indonesia, untuk mengizinkan referendum dilakukan bagi

---

<sup>184</sup> Peran Gereja Katolik di Timtim cukup besar, bisa dilihat di Carey, *op.cit.*, hal. 8-12, 120-132; dan Molnar. *op.cit.*, hal. 18-20.

---

<sup>185</sup> *Op.cit.*, hal. 126-135; Abdul Manan, *Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM* (Jakarta: Elsam, 2008, hal. 46.

<sup>186</sup> Cristalis, *op.cit.*, hal. 100-125.

masyarakat Timtim, apakah mereka memilih otonomi atau merdeka dari Indonesia.

Pertemuan antara tiga pihak, Indonesia, Sekjen PBB, dan Portugal bulan Agustus 2008 memulai dialog terkait usulan otonomi luas bagi Timtim. Ian Martin, Perwakilan Khusus Sekjen PBB di Timor Timur saat UNAMET bertugas, mengatakan bahwa untuk Indonesia otonomi ini adalah final, sedangkan Portugal bersedia untuk mempertimbangkan otonomi sebagai kesepakatan sementara sampai masyarakat Timtim memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.<sup>187</sup> Tanggal 27 Januari 1999, Presiden Indonesia mengumumkan bahwa masyarakat Timtim akan diberi kesempatan menentukan nasibnya sendiri.<sup>188</sup> Pada bulan May 1999, barulah disepakati adanya referendum.<sup>189</sup> Pada bulan Juni 1999,

UNAMET (*United Nations Assistance Mission to East Timor*) dibentuk di Timtim dan pendidikan bagi calon pemilih mulai dilakukan secara serius. Referendum sendiri akan dilaksanakan tanggal 30 Agustus 1999.<sup>190</sup>

Di tengah-tengah teror berdarah yang terjadi hampir di seluruh wilayah Timtim pra referendum, 98 persen pemilih memberikan suara mereka.<sup>191</sup> Tanggal 1 September, kotak-kotak suara dari seluruh Kabupaten atau Kota yang ada di Timtim dimasukkan dalam helikopter PBB dan dibawa ke Dili untuk dihitung. Tiga hari kemudian hasil referendum diumumkan di Dili, dan masyarakat Timtim akhirnya memilih untuk merdeka (78,5 persen) dibanding otonomi khusus (21,5 persen).<sup>192</sup> Pasca pengumuman, milisi pro-Indonesia mengamuk dan melakukan kerusuhan, serta penghancuran jalan, aliran listrik dan air, dan infrastruktur telekomunikasi. Situasi yang sempat damai ketika referendum berjalan, kembali

---

<sup>187</sup> Ian Martin. 2001. *Self-Determination in East Timor: The United Nation Nations, The Ballot, and International Intervention*. International Peace Academy Occasional Paper series. London: Lynne Rienner. Hlm. 19. Lihat juga: Suryokusumo. *Op cit.*, Hal. 157-160.

<sup>188</sup> Manfred Novak. 2003. *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM. Hal. 348-350.

<sup>189</sup> Mengadakan pemungutan suara langsung pasca konflik memang cukup berisiko, antara lain pemungutan suara dapat mengancam stabilitas keamanan dan banyak aktor-aktor konflik yang masih terstruktur dalam nuansa rezim otoriter, yang ditakutkan akan mengancam proses demokrasi. Lihat: Sabine Kurtenbach dan

---

Matthias Seifert. 2010. *Development Cooperation after War and Violent Conflict*. INEF Report. Duisburg: Institute for Development and Peace. hal. 18.

<sup>190</sup> Tambahan informasi terkait referendum bisa lihat Cristalis, *op.cit.*, hal. 94-99; Robinson, *op.cit.*, hal. 139-160.

<sup>191</sup> Molnar, *op.cit.*, hal. 72-74.

<sup>192</sup> *Ibid.*, hal. 59.

bereskalasi pasca hasil referendum diumumkan.

Setelah negosiasi yang panjang dan melelahkan, misi PBB pertama di Timtim masuk. Misi itu adalah UNAMET mulai Juni sampai Oktober 1999, dilanjutkan INTERFET (*International Force for East Timor*) yang dipimpin oleh Australia, dan diizinkan masuk Timtim pada 20 September 1999.<sup>193</sup> Parlemen Indonesia akhirnya secara formal mengakui bahwa integrasi Timtim ke wilayah Indonesia tidak lagi berlaku.<sup>194</sup> Xanana Gusmao pun dikembalikan ke Timtim pada 22 Oktober 1999. Terakhir, pada bulan Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB memberikan mandat kepada UNTAET (*United Nation Transitional Administration in East Timor*),<sup>195</sup> sekaligus perwakilan terakhir Indonesia akhirnya meninggalkan Timtim.<sup>196</sup>

## Kerangka Pemikiran

Konflik tidak bersifat statis, tetapi dinamis. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengerti dinamika dan tahapan dari sebuah konflik itu sendiri. Dinamika dan tahapan itu dapat dianalisis melalui teori kurva-U. Selain itu, memahami siklus konflik sangatlah penting untuk mengerti bagaimana, di mana, dan kapan kita sebaiknya menerapkan strategi untuk meresolusi konflik. Konflik sering dideskripsikan sebagai sebuah putaran perihalan tataran intensitas, seperti eskalasi dari tataran stabil dan damai menuju krisis dan perang, setelah itu deskalasi menjadi kedamaian yang relatif.

Siklus ini sifatnya berulang, dan proposisinya di dukung secara kuat oleh penelitian empirik terkait pola-pola konflik. Dalam kenyataannya, siklus konflik terjadi berulang-ulang dan melewati beberapa tahapan yang berbeda secara berulang-ulang juga. Dalam sebuah model kurva konflik yang ideal, sebuah konflik bergerak melalui semua tahapan dalam siklus sampai akhirnya konflik itu terselesaikan. Dalam kasus ini, kurva-U yang naik dan turun akan terlihat seperti gelombang kurva-U, mencapai tahapan perang lalu deeskalasi kembali menjadi damai

---

<sup>193</sup> Lihat Connaughton. *op.cit.*, hal. 243-249 dan Taylor B. Seybolt. 2008. *Humanitarian Military Intervention: The Condition for Success dan and Failure*. Oxford: Oxford University Press. Hal. 87-92.

<sup>194</sup> Lihat Suryokusumo, *op.cit.*, hal. 177-181.

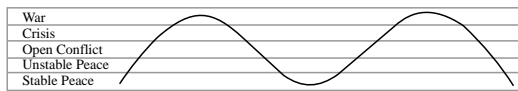
<sup>195</sup> Bisa dibaca bagaimana dinamika yang terjadi di UN terkait kasus Timtim ini di Suryokusumo. *Ibid.*, hal. 181-191.

<sup>196</sup> <http://www.globalissues.org/article/93/what-happened-in-east-timor>.



yang stabil, sampai konflik akhirnya terselesaikan, jika bisa diselesaikan tentunya. (lihat gambar di bawah).<sup>197</sup> Karena itulah, penulis beranggapan bahwa konflik yang terjadi di Timtim bersifat *suspended* karena pasca kemerdekaan Timtim masih mengalami beberapa konflik yang timbul dan tenggelam.

**Gambar I**  
**Model kurva konflik**

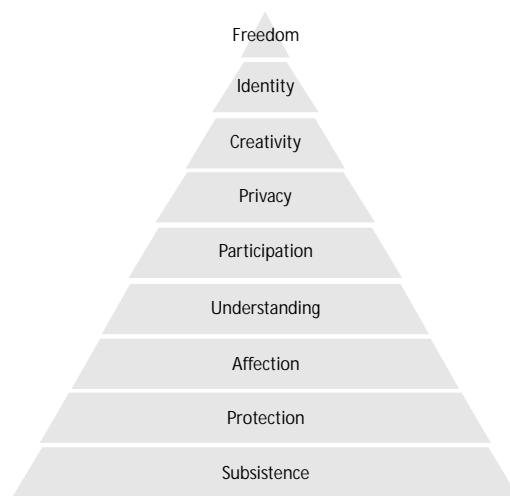


Teori kedua yang akan digunakan adalah teori *value* dan *needs* dari John Burton. Dari dua aktor utama konflik, yaitu pemerintah Indonesia dan Timtim, *value* dan *needs*-nya tentu berbeda. Timtim membutuhkan kemerdekaan, identitas, afeksi, dll. Ketika *value* dan *needs* ini tidak bisa dipenuhi, maka yang terjadi adalah konflik. Sedangkan, pemerintah Indonesia membutuhkan partisipasi, pengertian, dan memberikan perlindungan kepada Timtim. Masalah terjadi ketika upaya memberikan

<sup>197</sup> Niklas L.P. Swanstrom dan Mikael S. Weissmann. 2005. *Conflict, Conflict Prevention, Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration*. Concept Paper from Uppsala University, Sweden. Hal. 15. Lihat juga Johan Galtung. 1996. *Peace By Peaceful Means*. London: SAGE Publications. Hal. 81-88.

perlindungan berbenturan dengan keinginan untuk merdeka atau mencari identitas diri, apalagi ketika identitas itu ternyata berbeda dengan pelindungnya. Berikut adalah model teori tersebut, berikut keterangannya.<sup>198</sup>

**Gambar II**  
**Teori *value* dan *needs* dari John Burton**



**Keterangan teori *value* dan *needs***

- Kebutuhan dasar manusia adalah fisik, psikologis, dan spiritual.
- *Non negotiable human needs recognition, identity, security, autonomy dan bonding.*
- Tidak bisa ditekan dan pasti akan selalu muncul.
- Ketegangan antara kondisi deprivasi dengan yang seharusnya bisa diperoleh → konflik.

<sup>198</sup> Lihat John Burton, *Conflict Resolution and Provention* (New York: St. Martin Press, 1990), hal. 36-38.

### Aktor Konflik

Aktor yang pertama adalah Timor Timur itu sendiri. Secara *value*, masyarakat Timtim memang memiliki ikatan yang tidak kuat dengan Indonesia, apabila dibandingkan dengan masyarakat wilayah lain di Indonesia, seperti Aceh, Riau, Maluku, dll. Timtim secara legal, sejarah, dan moral bahkan bisa diklaim sangat bukan Indonesia. Wilayahnya pun menjadi provinsi ke-27 Indonesia pasca pendudukan militer Indonesia tahun 1976 ke sana. Alasan-alasan demikian menjadi alasan kuat bagi masyarakat Timtim untuk mengajukan kemerdekaan dari Indonesia.

Posisi dari pemerintah Indonesia dan Timtim, jika melihat dalam instrumen analisa konflik, bagian *conflict mapping*, terlihat bahwa keterlibatan (posisi) Timtim adalah sebagai aktor utama dengan pemerintah Indonesia. Digambarkan dengan lingkaran besar (melambangkan skala konflik yang besar), dengan garis zig-zag dan tanda petir yang menghubungkan dua lingkaran besar (antara pemerintah RI dan Timtim), yang artinya hubungan yang panas antara kedua aktor utama konflik ini.<sup>199</sup> Berikut, beberapa

organisasi yang berjuang demi kemerdekaan Timtim: FALINTIL (Armed Forces for the National Liberation of East Timor); CNRT (*The National Council for East Timorese Resistance*); FRETILIN (*Revolutionary Front for an Independent East Timor*); dan ASDT (*Timorese Social Democratic Association*).

Aktor yang kedua adalah pemerintah Indonesia. Kepentingannya mempertahankan integrasi Timtim di wilayahnya, dan mempertegas kekuasaan pendudukan di Timtim. Pemerintah Indonesia adalah pihak yang terlibat dan memiliki posisi langsung terhadap konflik Timtim ini (aktor utama). Digambarkan dengan lingkaran besar (melambangkan skala konflik yang besar), dengan garis zigzag dan tanda petir yang menghubungkan dua lingkaran besar (antara pemerintah RI dan Timtim), yang artinya hubungan yang panas antara kedua belah pihak.<sup>200</sup>

Aktor yang memiliki kepentingan sama dengan Indonesia adalah milisi-milisi pro-integrasi. Selain APODETI (*Timorese Popular Democratic Association*), ada indikasi pembentukan milisi (semacam

---

<sup>199</sup> Simon A. Mason & Sandra Rychard, *Conflict Analysis Tools*. Swiss Agency for Development and Corporation (SDC), 2006.

---

<sup>200</sup> *Ibid.*

PAM Swakarsa) di Timtim oleh militer Indonesia.<sup>201</sup> Kelompok-kelompok milisi bayangan ini mempunyai kepentingan untuk mengacaukan situasi keamanan di Timtim yang memang sudah buruk dan melawan pemberontak. Pada bulan November 1998, sekurangnya ada sebelas kelompok-kelompok milisi, sampai pasukan paramiliter, yang beroperasi di sana meneror masyarakat agar tidak berani melawan atau merdeka dari Indonesia.<sup>202</sup>

Milisi ini berharap dengan meningkatnya kekerasan di Timtim, maka akan menciptakan perang sipil dalam skala besar, lalu tentara Indonesia akan masuk untuk membatalkan referendum atas dasar kondisi darurat perang. Posisi milisi pro-integrasi adalah terlibat langsung dalam konflik Timtim, karena mereka banyak melakukan kejahatan dan pelanggaran perang terhadap masyarakat Timtim.<sup>203</sup> Salah satu

organisasi pro-integrasi adalah APODETI, seperti yang sudah disebutkan di atas, yang kepentingannya adalah berintegrasi dengan Indonesia.

Aktor yang ketiga adalah Portugal. Negara ini memiliki kepentingan untuk melihat Timtim merdeka. Hal ini tak lebih karena prestise Portugal di mata rakyatnya dan di mata para “sahabat” Eropanya. Sebab, selama ini di sejumlah bekas jajahannya, seperti Angola, Mozambik, dan Guinea-Bisau, Portugal hanya mampu menyisakan konflik dan penderitaan belaka. Negara ini tentunya akan menanggung malu melihat sebagai kaum penjajahannya mengeksploitasi berbagai sumber di wilayah itu berabad-abad lamanya.<sup>204</sup> Alasan ini sangat terkait dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Portugal dan umumnya bangsa bekas penjajah, seperti Inggris, Belanda, Perancis, dan Spanyol, untuk turut membantu daerah-daerah bekas koloninya mencapai kesejahteraan. Dengan sikap PBB yang menolak keabsahan integrasi Timtim ke dalam wilayah Indonesia, Portugal

---

<sup>201</sup> Geoffrey Robertson, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global* (Jakarta: Komnas HAM, 2002), hal. 529-530.

<sup>202</sup> Irena Cristalis, *East Timor: A Nation's Bitter Dawn* (New York: Zed Books Ltd., 2009), hal. 86.

<sup>203</sup> Geoffrey Robinson, *If You Leave Us Here, We Will Die: How Genocide was Stopped in East Timor* (New Jersey: Princeton University Press, 2009), hal. 99-109.

---

<sup>204</sup> Yani Wahid & Bakir Ihsan, *SBY dan Resolusi Konflik: Langkah-Langkah Penyelesaian Konflik di Aceh, Atambua, Maluku, Papua, Poso, dan Sampit* (Jakarta: Relawan Bangsa, 2004), hal. 82.

semakin memperoleh dukungan untuk memainkan diplomasinya di tingkat internasional. Upaya Portugal ini mendapat dukungan sejumlah negara besar, khususnya Uni-Eropa.

Posisi Portugal dalam konflik ini tidak terlibat langsung. Jika melihat dalam instrumen analisa konflik, bagian *conflict mapping*, terlihat bahwa keterlibatan Portugal di sini dilambangkan dengan garis putus-putus, yang berarti hubungan dengan aktor utama konflik (Timtim) tidak terlalu dekat. Di Timtim, partai UDT (*Timorese Democratic Union*) sudah ada sejak tahun 1974 dan memiliki kepentingan agar Timtim bergabung menjadi bagian dari federasi Portugal.<sup>205</sup>

Aktor keempat adalah Australia. Negara ini bukan aktor utama dalam konflik ini, tetapi sikap Australia terhadap persoalan Timtim bisa dianggap sebagai *securitizing actor* juga. Karena, itu menurut instrumen analisa konflik, bagian *conflict mapping*, Australia dilambangkan dengan garis *double*, menandakan hubungan sangat baik dengan salah satu aktor utama (Timtim). Australia

mulai menanamkan pengaruhnya di Timtim sejak proses referendum pada pertengahan 1999, hingga kini. Pengaruh yang diberikan kepada Timor Leste secara *immaterial* adalah memberikan dukungan politik di PBB bagi mereka Pasukan Australia juga merupakan bagian dari pasukan yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (dari UNAMET sampai UNMIT) di Timtim untuk menjaga keamanan negara tersebut.

Ditinjau dari sudut pandang geografis, Timtim memang mempunyai nilai yang sangat strategis. Setidaknya itu bisa dilihat dari banyaknya negara yang telah membuka perwakilan diplomatik di Dili. Ada Australia, Amerika Serikat, Jepang, Indonesia, Selandia Baru, Portugal, Malaysia, Korea Selatan, Irlandia dan Komisi Eropa. Di samping itu beberapa negara lainnya menjalin hubungan diplomatik dengan merangkap perwakilannya dengan Jakarta. Karena itu, Australia ingin memainkan perannya dalam menjamin keamanan dan stabilitas di Timtim.<sup>206</sup>

Kepentingan Australia yang

---

<sup>205</sup> Kristio Wahyono, *Sepuluh Tahun Tragedi Timtim: Timor Target* (Aceh: Krueng Aceh, 2009), hal. 91-93.

---

<sup>206</sup> Lihat Ben Kierman, *Genocide and Resistance in Southeast Asia: Documentation, Denial, and Justice in Cambodia and East Timor* (New Jersey: Transaction Publishers, 2009), hal. 249-257.

berdimensi ekonomi didorong oleh kebutuhan menemukan sumber energi baru. Celah Timor yang sudah dieksplorasi dan diperkirakan mengandung cadangan minyak yang kaya menjadi alasan utama di masa depan. Di balik sikap Australia itu terdapat keinginan untuk menguasai sumber minyak di perbatasan. Akses terhadap energi ini tak bisa disangkal menjadi pendorong semangat Australia ikut campur tangan dalam menangani gejolak di Timtim pasca jajak pendapat. Kesepakatan Celah Timor (*Timor Gap*) yang ditandatangani Indonesia-Australia tahun 1989 menyetujui pembagian 62.000 km persegi zona kerja sama menjadi tiga wilayah. Wilayah *joint development* merupakan wilayah yang berada di tengah dan terbesar dimana kedua negara berhak mengontrol eksplorasi dan produksi migas. Dalam catatan di ladang Bayu- Undan, ditaksir punya cadangan minyak 400 juta barel, tiga trilyun kubik gas alam dan 370 juta barel cairan (kondensat dan LPG).<sup>207</sup>

---

<sup>207</sup> Dalam perkembangannya dewasa ini, walau masih dikategorikan sebagai negara miskin, Timor Leste memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri minyaknya. Apalagi apabila mereka bisa menasionalisasi seluruh sumber dayanya. Lihat: <http://finance.detik.com/read/2012/11/27/140632/2102669/1034/cerita-timor-leste-yang-berjuang-menguasai-sendiri-gas-dan-minyaknya>

Minyak yang dilukiskan sangat besar kandungannya di perbatasan Timtim-Australia merupakan asset penting bagi perkembangan ekonomi masa depan negeri kangguru itu.

Selain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, kehadiran Australia di Timtim juga menunjukkan adanya indikasi kepentingan pertahanan dan keamanan. Memahami tujuan ini harus dilihat dari kepentingan keamanan Australia atas lingkungan internal Timtim, serta keamanan lingkungan strategis Australia. Dalam kaitan kebijakan pertahanan negaranya, krisis kawasan dinilai akan berpengaruh langsung terhadap keamanan nasional Australia. Kekuatan militer harus mampu diproyeksikan ke kawasan di sekitarnya yang dinilai rawan, tidak stabil, ekonominya lemah, ataupun gagal dalam menangani keamanan dan ketertiban. Australia selalu memandang musuh akan datang dari utara, karena itu arah pertahanan difokuskan ke utara.<sup>208</sup>

Setelah melihat dinamika yang terjadi selama konflik di Timtim, penjelasan berikut

---

<sup>208</sup> Richard Connaughton, *Military Intervention and Peacekeeping: The Reality* (Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2001), hal. 242.

akan membahas empat penyebab konflik yang terjadi di bekas provinsi termuda Indonesia itu. Empat penyebab itu adalah kondisi ekonomi yang buruk (kemiskinan), keragaman etnis, sistem politik yang represif, dan degradasi sumber daya. Berikut analisisnya.

### **Kondisi Ekonomi yang Buruk (Kemiskinan)**

Akibat invasi Indonesia tahun 1976, terdapat banyak orang Timor Leste yang mengungsi ke gunung dan hutan. Mereka kelaparan dan tidak punya tempat tinggal, sehingga banyak yang ditampung pasukan FRETILIN. Hal ini membuat rakyat simpati terhadap mereka, dan akhirnya berjuang membantu FRETILIN melawan pemerintah Indonesia. Selain memang, banyak orang Timtim yang miskin membuat mereka harus menjadi pejuang kemerdekaan untuk sekedar bertahan hidup.<sup>209</sup> Faktor ekonomi ini menjadi alasan pertama mengapa sering terjadi konflik di Timtim sehingga akhirnya mereka berjuang dan melawan pemerintah pusat untuk merdeka.

Saat masih mejadi provinsi ke-27,

<sup>209</sup> Kierman, *op.cit.*, hal. 140.

Timtim masih belum bisa mandiri. Perekonomian negara itu masih bergantung pada uluran tangan Jakarta. Pembangunan berjalan amat lamban di salah satu provinsi termiskin Indonesia tersebut. Karena itulah konflik di Timor Leste ini penulis kategorikan sebagai *suspended conflict*. Kemungkinan *conflict re-arises* sangat tinggi terkait masalah ekonomi yang hingga kini masih rendah di Timtim pasca kemerdekaannya. Hal ini karena negaranya memang dikategorikan sebagai negara miskin.<sup>210</sup>

Dalam masyarakat atau negara yang miskin, para pemimpinnya biasanya bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, yang biasanya sangat kecil. Keuntungan yang kecil itu diperebutkan oleh masyarakat miskin, sehingga kompetisi merebutkannya sangatlah ketat, dan berujung pada eskalasi konflik.<sup>211</sup> Dan juga, karena pemimpinnya gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi masyarakatnya, maka negara akan mengarah kepada negara gagal (*failed state*). Ketika itu

---

<sup>210</sup> Lihat data dari Global Finance terkait negara terkaya dan termiskin di dunia: <http://www.gfmag.com/tools/global-database/economic-data/12147-the-poorest-countries-in-the-world.html#axzz2IzbVsenE>

<sup>211</sup> Smith, *op.cit.*, hal. 7.

sudah terjadi, maka siklus konflik berulang kembali (lihat kurva-U di bagian awal tulisan)., dan akan terjadi konflik dalam skala besar.<sup>212</sup>

### **Keragaman Etnis**

Faktor kedua adalah keragaman etnis. Timtim memang tidak memiliki wilayah yang luas, tapi populasinya bisa dikatakan heterogen. Budaya yang besar, serta budaya yang beragam mengkarakteristikkan negara setengah pulau ini. Masyarakatnya, selain orang Timtim sendiri, terdapat juga beberapa bagian masyarakat lain, seperti pedagang dari Cina, keturunan imigran dari Arab, dan orang Indonesia yang menikah dengan orang Timtim. Beberapa contoh suku-suku lokal di Timtim, adalah Tetum dari Distrik (Kabupaten) Viqueque, Ema dari Marobo di Distrik Bobonaro, Mambai dari Distrik Aileu, Kemak, Bunaq, Fataluku, dan Galoli.<sup>213</sup>

Suku Kemak yang bermukim di Kabupaten Atsabe memiliki seorang raja atau pemimpin yang disebut *koronel bote*, dan dianggap memiliki potensi spiritual yang besar. Pada bagian pertama pendudukan Indonesia di Timtim, suku Kemak di Atsabe mampu mempertahankan otoritas mereka, dan kekuasaan mereka dimanifestasikan melalui jalur tradisional maupun negara. Mereka mendapat kedudukan sebagai camat, kepala desa, dan beberapa posisi pemerintahan lokal lainnya, seperti guru. Akan tetapi, di bagian kedua pendudukan Indonesia, kekuasaan *koronel bote* dan kerabatnya banyak mengalami perlawanan dari masyarakatnya sendiri. Alasan perlawanannya adalah karena kecemburuan akibat keuntungan-keuntungan ekonomi yang didapat, semenjak banyak kerabat *koronel bote* yang menjadi pemimpin birokrasi, dan anggota keluarga dari Gubernur Timtim yang kedua di era pendudukan Indonesia.

Tahun 1999, milisi pro-Indonesia beberapa kali menyerang kelompok yang terdiri dari kerabat-kerabat *koronel bote*, dan juga desa-desa di mana kelompok ini memiliki sekutu keluarga terdekat. Serangan ini ditenggarai lebih karena akibat ekonomi

---

<sup>212</sup> Anke Hoeffler. 2010. State Failure and Conflict Recurrence. Dalam J. Joseph Hewit, dkk. Peace and Conflict 2010: Executive Summary. Maryland: Center for International Development and Conflict Management. Hal. 23.

<sup>213</sup> Molnar, *op.cit.* Terkait kekerabatan dan kesukuan di Timor Timur, bisa dilihat dalam karya-karya antropolog budaya dari Inggris bernama David Hicks: David Hicks. 1990. Kinship and Religion in Eastern Indonesia. Goteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, hal. 9.

daripada politik, dan terjadi di saat-saat akhir pemerintahan Indonesia berkuasa di Timtim. Masyarakat Atsabe biasa juga menyebutkan satu alasan lagi mengapa mereka menyerang dan tidak menghormati kekuasaan kelompok *koronel bote*, adalah karena kerabat *koronel bote* mendukung para pejuang anti-Indonesia, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Sekalipun sudah merdeka, tetapi kebencian terhadap kelompok ini masih berlanjut karena mereka masih saja menguasai posisi-posisi di birokrasi, dan mendapat keuntungan ekonomi darinya.<sup>214</sup> Ini adalah salah satu contoh bagaimana faktor etnik ternyata bisa membuat sebuah konflik bertahan, walaupun kepentingan awal mereka sudah terpenuhi, dalam hal ini merdeka. Pasca kemerdekaan, akar-akar konflik masih tetap ada dan berpotensi berkembang menjadi besar, sehingga sulit berharap konflik ini akan *ended* jika tidak ada solusi yang memadai atasnya.

Ketegangan antara bagian Barat dan bagian Timur Timtim sebenarnya masih terlihat jelas hingga kini. Jadi, jika ada ketidakpuasan, konflik, persaingan, atau

pencabutan hak kepada masyarakat Timor kemungkinan terjadi perselisihan kembali diantara orang *loro sa'e* dan orang *loro munu*. Pemisahan antara orang Barat dan Timur memiliki ciri khas yang dalam, walaupun begitu asal muasalny masih belum jelas. Andrew McWilliam membuat perbedaan antara orang Timur (*loro sa'e*: “matahari terbit” atau *Firaku*) dan orang Barat (*loro munu*: matahari “terbenam” atau *Kaladi*) merujuk pada *Firaku* yang meluap-luap perasaannya dan *Kaladi* yang pendiam.<sup>215</sup>

Perbedaan ini berdasarkan etimologi rakyat dan muncul waktu jaman Portugis. Istilah *Firaku* berasal dari *vira ocu* (untuk memalingkan hadapan dari sang pembicara) yang melambangkan pembangkangan dan karakter mandiri. Sedangkan, *Kaladi* berasal dari bahasa Portugis *calado* yang artinya sunyi dan suka menyendiri. Pemisahan antara bagian barat dan bagian timur dari populasi Timor Leste mengacu pada sejarah integrasi wilayah dan etnik, serta perbedaan budaya. Umumnya bahasa yang digunakan di barat

---

<sup>214</sup> Molnar, *op.cit.*, hal. 15-18.

---

<sup>215</sup> Andrew McWilliam. 2006. On East and West from Andrew McWilliam from EAST TIMOR STUDIES MAILING LIST. <http://www.etan.org/et2006/may/20/23oneast.htm>.



(dengan pengecualian bahasa Bunaq) termasuk cabang dari bahasa Melayu Polinesia Tengah dari keluarga bahasa Austronesia. Sedangkan, bahasa yang umum digunakan di timur adalah bahasa Papua dari filum Trans-Nugini.

Di Dili terjadi wacana yang menuduh bahwa orang-orang barat sudah merasa puas dengan pendudukan Indonesia, kebalikan dengan orang-orang timur yang tidak pernah menyerah untuk memperjuangkan kemerdekaan Timtim. Karena itulah, milisi Timtim yang pro-Indonesia berasal dari orang-orang barat (*Kaladi*). Tentunya orang barat membantahnya, akan tetapi, tidak bisa dibantah bahwa pendukung utama partai APODETI datang dari orang-orang barat di distrik Atsabe. Dan orang-orang timur banyak yang bergabung dengan FALINTIL (Pasukan Pembebasan Timtim).

Konflik muncul ketika orang timur dan barat bertempur karena orang-orang timur yang ingin merdeka, dan berjuang melalui FALINTIL, berhadapan dengan orang-orang barat yang ingin Timtim tetap di wilayah Indonesia. Di sini kita bisa melihat bahwa konflik yang terjadi di Timtim pun disebabkan persaingan antar etnik juga. Perseteruan

antara *Firaku* dan *Kaladi* yang sudah ada sejak jaman penjajahan Portugis dulu, ternyata bermanifestasi menjadi konflik antara pro-integrasi dan pro-kemerdekaan.<sup>216</sup> Karena itu, keragaman etnis di Timtim dapat menjadi salah satu pemicu konflik. Sebuah negara yang memiliki etnis beragam, terkadang malahan memeruncing konflik dan meningkatkan potensi terjadinya eskalasi.<sup>217</sup>

### **Sistem Politik Represif**

Sistem politik yang represif menjadi alasan ketiga. Penelitian terkait hubungan antara sistem politik dengan perdamaian dimulai dari pengamatan bahwa negara-negara demokratis hampir tidak pernah berperang satu sama lain. Negara yang sedang transisi menuju demokrasi adalah negara yang paling rawan konflik, seperti di Timtim ini.<sup>218</sup> hal ini karena selama 24 tahun Timtim berada di bawah rezim otoriter Soeharto. Di masa itu segala tindakan yang dianggap membahayakan rezim yang berkuasa langsung ditindak tegas oleh hukum karena segala tindakan tersebut langsung dicap sebagai tindakan maker, subversif, dan haram

---

<sup>216</sup> Molnar, *op.cit.*, hal. 146

<sup>217</sup> Smith, *op.cit.*, hal. 6.

<sup>218</sup> *Ibid.*

berkembang di wilayah NKRI. Segala sesuatu dikontrol secara “*overload*”, sehingga kebebasan berpendapat menjadi hal yang langka dan sangat berharga. Berbagai aktivis yang menentang pemerintah langsung ditindak secara hukum dengan sangat tegas. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat kental dalam setiap sendi pemerintahan. Pada masa itu, masyarakat berada pada kesenjangan sosial yang sangat parah.

Di bagian awal tulisan ini banyak dijelaskan bagaimana sikap pemerintah Indonesia, salah satunya melalui militer, dalam memperlakukan masyarakat Timtim. Sistem politik di Jakarta sangat bersikap represif terhadap situasi politik di Timtim, apalagi terkait kebijakan menghadapi pihak-pihak yang ingin merdeka di sana. Akan tetapi, situasi berbalik ketika mundurnya Soeharto. Angin segar demokrasi seperti berhembus dan memberikan badai bagi Habibie untuk bijak dalam meresponi aspirasi rakyat Timtim. Akhirnya, referendum pun dijalankan dengan hasil masyarakat Timtim memutuskan untuk merdeka dari Indonesia.

Sebenarnya, sejumlah pemimpin Indonesia percaya bahwa pembangunan yang mereka lakukan di Timtim akan

memenangkan hati penduduk sehingga mereka setuju untuk bergabung dengan Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia, di bawah rezim Orde Baru ketika itu, memerintah dengan kejam dan banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama terhadap mereka yang menolak integrasi. Akibatnya konflik tak bisa dihindari.

Pasca pengumuman referendum, terdapat sekurang-kurangnya enam peristiwa pengungsian besar-besaran di Dili, Baucau, dan Lautem. Sekitar 250.000 warga sipil dipaksa atau terpaksa mengungsi ke wilayah NTT. Pola pengungsian paksa dilakukan dengan adanya serangan milisi ke kampung-kampung dan memaksa penduduk meninggalkan pemukimannya. Sementara itu, di berbagai jalan utama sudah menunggu kendaraan yang disediakan aparat keamanan dan digunakan untuk membawa penduduk ke wilayah NTT.

Pengungsian paksa ini didahului dengan intimidasi, ancaman, teror yang kejam, dan ganas oleh milisi bersama aparat keamanan, sehingga para penduduk sipil kehilangan keberanian untuk tinggal. Pengungsian paksa ini dilakukan dengan

berbagai modus operandi yang menegaskan adanya suatu perencanaan yang sistematis. Dokumen yang diperoleh dan keterangan pengungsi memberikan indikasi bahwa pengungsian paksa ini sudah direncanakan sejak lama untuk mengantisipasi kekalahan dalam jajak pendapat.<sup>219</sup> Kondisi ini sangat *war-prone*, dan konflik di Timtim ternyata bereskalasi, karena itu kembali penulis katakan, bahwa konflik ini dapat dikategorikan sebagai *suspended conflict*.

### Degradasi Sumber Daya

Alasan yang terakhir adalah persoalan degradasi sumber daya. Ketika awal kerusuhan mulai melanda Dili tahun 1998, kerusakan dan kehancuran bukan disebabkan oleh kebijakan negara, tetapi akibat rusaknya sosial ekonomi rakyat. Di Timtim kehancuran kota Dili menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Timtim menjadi sangat mahal, perdagangan dan investasi nihil, GDP per kapita merosot hingga US\$ 330 dipenghujung tahun 1999, dan inflasi dengan index harga konsumen bagi

orang miskin di Dili naik 200 persen.<sup>220</sup> Otomatis, sumber-sumber daya pendukung kehidupan seperti listrik, air, bahan makanan, dll menjadi langka di Timtim. Di tengah-tengah kondisi kelangkaan, potensi konflik untuk muncul sangat tinggi, karena orang akan berebut untuk sumber-sumber daya yang tersisa, dengan tidak mengindahkan lagi aturan yang berlaku. Ditakutkan jika kondisi *law less* seperti ini terus berlangsung, Timtim yang sekarang sudah jadi negara, bisa jadi berubah menjadi negara gagal (*failed state*).

### Kesimpulan

Dalam masyarakat atau negara yang miskin, para pemimpinnya biasanya bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, yang biasanya sangat kecil. Keuntungan yang kecil itu diperebutkan oleh masyarakat miskin sehingga kompetisi merebutkannya sangatlah ketat dan berujung pada eskalasi konflik. Timtim memang tidak memiliki wilayah yang luas, tapi populasinya bisa dikatakan heterogen. Budaya yang besar, serta budaya yang beragam mengkarakteristikan negara setengah pulau

---

<sup>219</sup> Fadillah Agus, dkk., *Pengadilan Setengah Hati: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Timor Timur* (Jakarta: Elsam, 2008), hal. 17.

---

<sup>220</sup> Wahyono, *op.cit.*, hal. 23.

ini. Masyarakatnya, selain orang Timtim sendiri, terdapat juga beberapa bagian masyarakat lain. Sekalipun sudah merdeka, tetapi kebencian terhadap kelompok ini masih berlanjut karena mereka masih saja menguasai posisi-posisi di birokrasi, dan mendapat keuntungan ekonomi darinya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana faktor etnik ternyata bisa membuat sebuah konflik bertahan, walaupun kepentingan awal mereka sudah terpenuhi, dalam hal ini kemerdekaan.

Selama 24 tahun Timtim berada di bawah rezim otoriter Soeharto. Di masa itu segala tindakan yang dianggap membahayakan rezim yang berkuasa langsung ditindak tegas oleh hukum karena segala tindakan tersebut langsung dicap sebagai tindakan maker, subversif, dan haram berkembang di wilayah NKRI. Sistem politik yang represif ini membuat rakyat Timtim akhirnya memutuskan melawan rezim Soeharto. Di tengah kehidupan politik yang represif, sumber-sumber daya pendukung kehidupan seperti listrik, air, bahan makanan, dll pun menjadi langka di Timtim. Di tengah-tengah kondisi kelangkaan, potensi konflik untuk muncul sangat tinggi, karena orang akan berebut untuk sumber-sumber daya yang

tersisa, dengan tidak mengindahkan lagi aturan yang berlaku.

Untuk itulah, penulis menyarankan bahwa diperlukan niat dari setiap pihak yang terlibat dalam konflik di sana, untuk membangun perdamaian dan rekonsiliasi. Demokrasi yang masih seumur jagung di Timor Leste harus dibarengi dengan kematangan manusianya pula untuk mengimplementasikannya. Pengalaman di masa lalu terkait genosida dan rezim otoriter harus menjadi pelajaran bagi kita agar di masa depan penegakan hukum dan konsekuensi logis dari demokrasi diperlukan bagi terciptanya masyarakat madani yang hidup dalam harmoni. Rekonsiliasi dan proses *peacebuilding*<sup>221</sup> jadi argumen utama untuk sama-sama berjuang demi tercapainya *long lasting peace* di salah satu negeri termuda dunia tersebut.

---

<sup>221</sup> Proses *peacebuilding* harus bersifat *long term* karena membutuhkan perubahan mendasar pada person, struktur, hubungan, dan aspek-aspek budaya dari sebuah konflik, lalu berlangsung dalam periode short-middle-long, dan mempengaruhi sistem-sistem lain di waktu yang berbeda pula. Lengkapnya lihat: John Paul Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies* (Washington D.C: United States Institute of Peace Press, 1997), hal. 24 dan Hugh Miall, *Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task*, Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, 2004, hal. 6.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Aditjondro, George J. 2001. *Timor Lorosa'e's Transformation from Jakarta's Colony to a Global Capitalist Outpost*. Jakarta: Center for Democracy and Sosial Justice Studies.
- Agus, Fadillah, dkk. 2008. *Pengadilan Setengah Hati: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Timor Timur*. Jakarta: Elsam.
- Burton, John. 1990. *Conflict Resolution and Provention*. New York: St. Martin Press.
- Carey, Peter. *The Forging of a Nation: East Timor*. Dalam Peter Carey dan G. Carter Bentley (ed). 1995. *East Timor at the Crossroads: The Forging of a Nation*. New York: Social Science Research Council.
- Connaughton, Richard. 2001. *Military Intervention and Peacekeeping: The Reality*. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
- Cristalis, Irena. 2009. *East Timor: A Nation's Bitter Dawn*. New York: Zed Books Ltd.
- Galtung, Johan. 1996. *Peace By Peaceful Means*. London: SAGE Publications.
- Hicks, David. 1990. *Kinship and Religion in Eastern Indonesia*. Goteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
- Hoeffler, Anke. 2010. *State Failure and Conflict Recurrence*. Dalam J. Joseph Hewit, dkk. *Peace and Conflict 2010: Executive Summary*. Maryland: Center for International Development and Conflict Management.
- Kierman, Ben. 2009. *Genocide and Resistance in Southeast Asia: Documentation, Denial, and Justice in Cambodia and East Timor*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Kurtenbach, Sabine dan Matthias Seifert. 2010. *Development Cooperation after War and Violent Conflict*. INEF Report. Duisburg: Institute for Development and Peace.
- Lederach, John Paul. 1997. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington D.C: United States Institute of Peace Press.
- Manan, Abdul. 2008. *Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM*. Jakarta: Elsam.
- Martin, Ian. 2001. *Self-Determination in East Timor: The United Nation Nations, The Ballot, and International Intervention*. International Peace Academy Occasional Paper series. London: Lynne Rienner.
- McCloskey, Stephen. 2000. *Introduction: East Timor from European to Third World Colonialism*. Dalam Paul Hainsworth dan Stephen McCloskey (ed). *The East Timor Question; The Struggle for Independence from Indonesia*. New York: I.B. Taurus.
- Miall, Hugh. 2004. *Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task*. Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.
- Molnar, Andrea Katalin. 2010. *Timor Leste: Politics, History, and Culture*. New York: Routledge.
- Novak, Manfred. 2003. *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.
- Robertson, Geoffrey. 2002. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*. Jakarta: Komnas HAM.

- Robinson, Geoffrey. 2010. *If You Leave Us Here, We Will Die: How Genocide was Stopped in East Timor*. New Jersey: Princeton University Press.
- Seybolt, Taylor B. 2008. *Humanitarian Military Intervention: The Condition for Success dan and Failure*. Oxford: Oxford University Press.
- Smith, Dan. 2004. *Trends and Causes of Armed Conflict*. Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2004. *Praktik Diplomasi*. Jakarta: BP Iblam.
- Swanstrom, Niklas L.P. dan Mikael S. Weissmann. 2005. *Conflict, Conflict Prevention, Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration*. Concept Paper from Uppsala University, Sweden.
- Wahid, Yani dan Bakir Ihsan. 2004. *SBY dan Resolusi Konflik: Langkah-Langkah Penyelesaian Konflik di Aceh, Atambua, Maluku, Papua, Poso, dan Sampit*. Jakarta: Relawan Bangsa.
- Wahyono, Kristio. 2009. *Sepuluh Tahun Tragedi Timtim: Timor Target*. Aceh: Krueng Aceh.
- Wandita, Galuh, dkk. 2008. *Belajar Mengupayakan Reparasi di Timor-Leste: Menjangkau Para Korban Perempuan*. Dalam Ruth Rubio-Marin (ed). *Perempuan Menggugat: Masalah Gender dan Reparasi dalam Kejahatan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Elsam.

#### Websites:

- Global Finance. *The Poorest Countries in the World*. Diunduh dari <http://www.gfmag.com/tools/global-database/economic-data/12147-the-poorest-countries-in-the-world.html#axzz2IzbVsenE>. Diakses pada 31 Januari 2013.
- Malik, Ichsan. *Analisis & Perspektif Resolusi Konflik*. Diunduh dari [http://www.titiandamai.or.id/konten.php?nama=Sumber&op=detail\\_sumber&id=10](http://www.titiandamai.or.id/konten.php?nama=Sumber&op=detail_sumber&id=10). Diakses pada 30 Januari 2013.
- McWilliam, Andrew. 2006. *On East and West from Andrew McWilliam*. East Timor Studies Mailing List. Diunduh dari <http://www.etan.org/et2006/may/20/23oneast.htm>. Diakses pada 30 Januari 2013.
- Ninov, Irfan. 2011. *Kepentingan Australia Di Timor Leste*. Diunduh dari <http://repository.upnyk.ac.id/1343/>. Diakses pada 29 Januari 2013
- Purnomo, Herdaru. 27 November 2012. *Cerita Timor-Leste yang Berjuang Menguasai Sendiri Gas dan Minyaknya*. Diunduh dari <http://finance.detik.com/read/2012/11/27/140632/2102669/1034/cerita-timor-leste-yang-berjuang-menguasai-sendiri-gas-dan-minyaknya>. Diakses pada 26 Januari 2013.
- Shah, Anup. *What Happened in East Timor?* 10 September 2010. Diunduh dari <http://www.globalissues.org/article/93/what-happened-in-east-timor>. Diakses pada 30 Januari 2013.